



JOURNAL IDEA OF HISTORY

e-ISSN 2614-4395

p-ISSN 2598-7828

Volume 4 No. 1 Januari - Juni 2021

JOURNAL IDEA OF HISTORY Volume 4 No. 1 Januari - Juni 2021



Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kendari

Journal Idea Of History

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Editor-In-Chief

Dr. La Ode Ali Basri, S.Pd., M.Si.

Editor

Dra. Aswati M., M.Hum. (Univ. Halu Oleo)
Fatma, S.Pd., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Faika Burhan, S.S., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Raemon, S.Sos., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Sarman, S.Pd., M.Pd. (Univ. Halu Oleo)
Hisna, S.Pd., M.Hum. (Univ. Halu Oleo)
Hasni Hasan, S.Pd., M.Si. (Univ. Halu Oleo)
Suharni Suddin, S.Pd., M.Pd. (Univ. Halu Oleo)
Khabiirun, S.Sos., M.Sos. (Univ. Halu Oleo)
Salebaran, S.Hum., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Nur Ihsan D., S.S., M.Hum. (Univ. Hasanuddin)
Mohammad Sairi, S.Pd., M.A. (Univ. Datokarama Palu)

Reviewer

Dr. Basrin Melamba, S.Pd., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Dr. Aslim, S.S., M.Hum. (Univ. Halu Oleo)
Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. (IHDN Denpasar)
Dr. La Ode Rabani, M.Hum. (Univ. Airlangga)
Haliadi Sadi, S.S., M.Hum., PhD. (Univ. Tadulako)
Hendra, M.Phil., M.A. (Univ. Tadulako)
Dr. Ilham Daeng Makkelo, M.Hum. (Univ. Hasanuddin)
Asyhadi Mufsi Sadzali, S.S., M.A. (Univ. Jambi)
Dr. Nina Witasari, M.Hum. (Univ. Negeri Semarang)
Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi, S.S., M.A., M.M. (Univ. Gadjah Mada)

Desain Grafis:

Masrin, S.IP., M.A.P. (Univ. Halu Oleo)

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
JL. H.E.A Mokodompit Kendari

DAFTAR ISI

Kadie Lapandewa sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton pada Masa Pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin: 1610-1631	1-11
La Halimuna	
La Ode Ali Basri	
Hayari	
Sejarah Pemerintahan Onderdistrik Pondidaha: 1939-1964	12-24
Leni Suciati	
Basrin	
Melamba	
Fatma	
Perjuangan La Ode Ngkadiri di Kerajaan Muna dalam Melawan Belanda : 1626-1667	25-34
Wa Sema	
Aswati M.	
Hamuni	
Perlawanan Rakyat Moronene Taubonto terhadap Imperialisme Belanda: 1911-1941	35-45
Muhammad Rahdan	
Ali Hadara	
Aslim	
Peranan Zending bagi Kehidupan Masyarakat Tolaki di Poli-Polia Kolaka Bagian Timur: 1918-1942	46-56
Ferdinand Sandu	
Syahrin	
Hisna	
Dinamika Desa Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Periode 1966-1983.	57-64
Jumiati	
Khabiirun	
Evang Asmawati	
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Muna pada Masa Pendudukan Jepang: 1942-1945	65-74
Wa Santi	
Sarman	
Faika Burhan	
Sitti Hermina	
Biografi Seni Ni Ketut Arini, Seorang Penari dan Guru Tari Bali 1943–2020 : Pendekatan Struktural Fungsional	75-90
Dwi Ari Wulaningsih	
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Distrik Rumbia pada Masa Pemerintahan Mokole I Pimpie:.....	91-101
Karmianti	
Suharni Suddin	
Elmy Selfiana Malik	

PERLAWANAN RAKYAT MORONENE TAUBONTO TERHADAP IMPERIALISME BELANDA: 1911-1941

Oleh:

Muhammad Rahdan

Ali Hadara

Aslim

(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo)

Abstact

The resistance of the people in Moronene against the Netherlands was based on the desire to be free from Dutch interference. This resistance was spearheaded by the spirit of Sangia Dowo as the Moronene King to carry out a common struggle. In this regard, this study aims to find out (1) the background of the Moronene people's resistance to Dutch imperialism in Taubonto, (2) the strategy of people in Moronene in fighting the Dutch imperialism in Taubonto, (3) the impact of the Moronene people's resistance to Dutch imperialism in Taubonto. The method used in this research was historical research which consist of five steps such as: topic selection, source heuristics, verification, source interpretation, and historiography. The result of this research showed that (1) The background of the resistance of the Moronene people was based on the spirit of struggle for the desire to be independent without the intervention of the Dutch. The spirit of Moronene people was ignited by Sangia Dowo, a king of Moronene who fought back. (2) The strategy of the Moronene people's fight against the Dutch was carried out by guerrilla and open attacks through the purchase of weapons of war to the Portuguese. (3) the resistance of the Moronene people led to the death of Moronene kings, one of them was King Sangia Dowo. Sangia Dowo died of being poisoned by the Dutch through a dinner party in a meeting of ceasefire. The defeat of the Moronene Kingdom led to the fall of the region to the Dutch Government. This defeat caused the Moronene people to suffer from high tax collections and forced labor policy by the Netherlands.

Keywords: Defense, Resistance, Strategy, and Struggle.

Abstrak

Perlawanan rakyat Moronene terhadap Belanda didasari oleh keinginan untuk terbebas dari campur tangan Belanda. Perlawanan tersebut dipelopori oleh semangat Sangia Dowo sebagai Raja Moronene untuk melakukan perjuangan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang perlawanan Rakyat Moronene atas imperialisme Belanda di Taubonto, (2) strategi perlawanan Rakyat Moronene atas imperialisme Belanda di Taubonto, dan (3) dampak perlawanan Rakyat Moronene atas imperialisme Belanda di Taubonto. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui lima tahapan-tahapan kerja sebagai berikut (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik sumber, (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi sumber, (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang perlawanan rakyat Moronene didasari oleh semangat perjuangan atas keinginan untuk berdikari tanpa campur tangan pihak Belanda. Semangat masyarakat Moronene dikobarkan oleh Sangia Dowo seorang Raja Moronene yang melakukan perlawanan. (2) Strategi perlawanan rakyat Moronene saat melawan Belanda dilakukan dengan bergerilya dan serangan terang-terangan melalui pembelian senjata perang ke pihak Portugis. (3) Perlawanan rakyat Moronene menyebabkan gugurnya banyak Raja Moronene salah satunya yaitu Raja Sangia Dowo. Sangia Dowo meninggal akibat diracun oleh Belanda melalui perjamuan makan malam dalam rangka pertemuan saat melakukan gencatan

senjata. Kekalahan Kerajaan Moronene menyebabkan jatuhnya wilayah tersebut ke Pemerintahan Belanda. Kekalahan tersebut menyebabkan rakyat Moronene menderita akibat pemungutan pajak yang tinggi dan kebijakan kerja rodi oleh Belanda.

Kata Kunci : Perlawanan, Pertahanan, Perjuangan, Strategi

1. PENDAHULUAN

Lahirnya imperialisme Belanda di Indonesia berawal dari ekspedisi empat kapal dagang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bersandar di Banten pada tahun 1596. Ekspedisi pertama Belanda ini tidak membuahkan hasil karena penduduk pesisir Banten mengusirnya. Meskipun gagal, ekspedisi berikutnya kembali dilakukan. Ekspedisi kedua Belanda yang dipimpin Jacob van Neck pada tahun 1598 bersandar kembali di Banten. Dengan berbekal pengalaman pahit dari ekspedisi Cornelis de Houtman, para pelaku ekspedisi kemudian berlaku sopan dan hormat kepada penduduk setempat. Kedatangan ekspedisi ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Banten terlebih saat itu masyarakat sedang bermusuhan dengan Portugis. Situasi ini menjadi peluang bagi Belanda untuk mulai membina kerja sama di bidang perdagangan.

Setelah mendapatkan keuntungan yang banyak, rombongan Belanda kembali ke negerinya. Keberhasilan ekspedisi Belanda kedua ini telah mendorong para pedagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Sejak saat itu, berbondong-bondonglah kapal Belanda datang ke wilayah-wilayah di Indonesia. Maka Johan Van Oldenbarneveltd kemudian mengusulkan agar masyarakat Belanda membuat sebuah kongsi dagang.

Masuknya imperialisme Belanda dengan sistem ekspansi perdagangan akhirnya berdampak pada seluruh daerah Taubonto pada tahun 1911-1941. TaobontO merupakan daerah yang juga dikenal dengan nama Moronene dan saat ini lebih dikenal pula dengan nama Bombana. Sebelumnya Moronene secara administratif berada dalam wilayah pemerintahan tingkat II Kabupaten Buton pada masa lalu namun kini berdiri sendiri menjadi Kabupaten Bombana.

Moronene di masa lalu merupakan salah satu kerajaan besar yang berdiri sendiri di bawah pemerintahan seorang raja (Sangia). Kerajaan Moronene terletak di tengah-tengah daratan Moronene di sebelah selatan dekat pantai. Konstruksi wilayah Kerajaan Moronene dilindungi oleh dua buah pegunungan sehingga sukar dijangkau oleh musuh yang datang dari luar. Potensi Kerajaan Moronene sebagai sebuah kerajaan besar yang disegani membuat Belanda memasukkannya sebagai tujuan destinasi ekspansi dagang selanjutnya.

Pada tahun 1911 Kerajaan Moronene jatuh ke tangan Belanda. Setelah Belanda berhasil menguasai Kerajaan Moronene maka Belanda mulai menerapkan sistem politik *divide et impera* atau memecah belah kerajaan Moronene dalam tiga kerajaan kecil yaitu Kerajaan Rumbia yang berpusat di TaubontO, Kerajaan Polea (Poleang) yang berpusat di Toburi, serta Kerajaan Kotua yang berpusat di Tangkeno (Kabaena). Pemecahan menjadi tiga kerajaan kecil ini bertujuan agar dapat mengontrol wilayah Kerajaan Moronene yang begitu luas. Selain membagi kerajaan menjadi tiga, Belanda juga melakukan monopoli perdagangan, melaksanakan pajak yang tinggi, dan juga menerapkan kerja rodi pada masyarakat. Akibat tindakan ini masyarakat merasakan ketidakadilan.

Perlawanan rakyat Moronene terhadap imperialisme Belanda dimulai pada Tahun 1906 ketika Sangia Dowo diangkat menjadi Raja Poleang. Melihat situasi negerinya yang sedang terancam dengan adanya imperialisme Belanda maka ia berusaha mempersatukan kekuatan-kekuatan yang ada dalam wilayah Kerajaan Moronene tersebut dengan semboyan “kita harus bersatu karena asal kita satu”. Gagasan tersebut berhasil sehingga ketiga kerajaan kecil tersebut dapat dipersatukan kembali dalam bingkai Kerajaan Moronene. Perjuangan melawan imperialisme

Belanda dimulai oleh Sangia Dowo dan tiga panglimanya yakni Mbohogo (Sangia Tepolelebo), I Ule (Dalako I Wolio), dan Inggani.

Ketiga tokoh pejuang merupakan bukti perlawanan masyarakat Moronene dalam memperjuangkan hak-hak atas penindasan imperialisme Belanda. Ketiga tokoh tersebut telah mengorbankan jiwa raganya dalam menentang segala bentuk penjajahan Belanda, demi membela hak, harkat dan martabat masyarakat dan Kerajaan Moronene. Ketiganya gugur di medan perang dengan jalannya masing-masing. Sangia Dowo wafat akibat diracun oleh Belanda dalam satu perundingan di usia 37 Tahun. Beliau diberi gelar Sangia Nilemba yang artinya raja yang di usung sebab jasad Sangia Dowo diusung oleh para prajuritnya menuju kerajaan untuk dimakamkan. Kemudian Mbohogo wafat setelah masuk pada jebakan Belanda saat melakukan penyerbuan. Ia ditawan dan diasingkan ke Nusa Kambangan hingga akhirnya wafat di tiang gantungan. I Ule juga ditawan dan dibawa ke Wolio hingga berakhir di tiang gantungan. I Ule kemudian diberi gelar *Dalako I Wolio* yang berarti yang pergi ke Wolio.

Batasan masalah penelitian ini dibatasi baik secara temporal, spasial maupun tematis. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa batasan masalah dalam penelitian ini sangat kompleks sehingga perlu berfokus pada titik persoalan sehingga dapat menjawab substansi permasalahan secara memadai. Batasan temporalnya dimulai pada tahun 1911 adalah awal mula munculnya perlawanan atas imperialisme Belanda di Kerajaan Moronene dan puncaknya pada Tahun 1941. Batasan spasialnya adalah di daerah Taubonto yang merupakan bekas kerajaan Moronene saat itu dan masih terdapat peninggalan Belanda berupa artefak. Sementara batasan tematis sesuai dengan batasan masalah sehingga fokus penelitian ini adalah perlawanan Masyarakat Moronene terhadap imperialisme Belanda. Pembahasan ini akan dimulai dengan bagaimana latar belakang perlawanan rakyat terhadap imperialisme Belanda di daerah Taubonto, strategi perlawanan rakyat Moronene terhadap imperialisme Belanda di daerah Taubonto, dampak perlawanan rakyat Moronene terhadap imperialisme Belanda di daerah Taubonto.

Penelitian mengenai perlawanan masyarakat Moronene dapat ditinjau menggunakan konsep perlawanan, konsep nasionalisme dan patriotisme, serta konsep sejarah. Konsep perlawanan merupakan kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka (Zubir, 2002).

Soekanto (dalam Kusuma dan Agustina, 2003) menjelaskan bahwa perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka yang mengalami perubahan. Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas maka, perlawanan pada umumnya merupakan reaksi masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu atau dengan kata lain, perlawanan suatu gerakan yang dilakukan oleh rakyat untuk menentang sesuatu yang tidak diinginkan.

Selain konsep perlawanan, perlawanan tersebut juga dilihat dari konsep nasionalisme dan patriotisme. Kata nasionalisme mengandung berbagai tafsiran tentang arti dan maknanya, hingga dalam segala hal timbul keinginan untuk berusaha menjaga dan mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman yang dapat menghancurkan keutuhan bangsanya. Legawa (2007) mengkaji nasionalisme dengan mengupas nasionalisme negara-negara Postkolonial yang muncul sebagai sebuah bentuk perjuangan anti-kolonial yang merupakan ekspresi pemberontakan atas diskriminasi dan ketidakadilan selama kolonialisme yang dirasakan oleh subjek yang terjajah. Lebih lanjut Legewa menunjukkan bahwa nasionalisme postkolonial merupakan adopsi dari nilai-nilai Barat untuk bisa sejajar dengan peradaban Barat, namun di sisi lain terjadi penolakan atas Barat karena dampak kolonialisme yang ditimbulkan. Dalam hal ini terjadi proses hibridasi, dimana gabungan

antara pembaratan dengan nilai-nilai spiritual ketimuran menghasilkan sebuah ide atas kebangsaan baru, yang walaupun meniru Barat, tapi tidak sepenuhnya Barat.

Nasionalisme adalah bagian dari budaya tinggi (high culture), dimana nasionalisme tidak bersifat ilmiah, tetapi merupakan suatu gejala sejarah yang timbul sebagai respon terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Dari latar belakang sejarah seperti itulah nasionalisme dimaknai sebagai suatu perjuangan untuk membuat budaya dan politik selalu bersesuaian.

Nasionalisme mengandung makna sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, yang dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa, (Ernets Gellner Dalam Moesa, 2007:29). Dalam konteks ini, nasionalisme adalah *supreme loyalty* terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan ini muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Selain itu patriotisme juga memiliki makna meliputi sikap-sikap bangsa akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya, dan adanya keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa.

Rashid (2004: 5) menyebutkan beberapa nilai patriotisme, yaitu kesetiaan, keberanian, rela berkorban, serta kecintaan pada bangsa dan negara. Hal tersebut dapat terlihat pada sikap atau perbuatan seseorang dalam memberikan sebagian dan bahkan sepenuhnya apa yang mereka miliki terhadap bangsa dan negaranya. Dengan demikian jelas bahwa nasionalisme dan patriotisme menjadi penggerak perjuangan yang menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang terbebas dari perasaan terjajah. Nasionalisme dan patriotisme mampu menumbuhkan rasa persaudaraan sesama warga bangsa supaya dapat mewujudkan semangat dalam mempertahankan kedaulatan negara republik Indonesia yang telah merdeka.

Selain konsep perlawanan dan nasionalisme, penelitian ini dapat dilihat melalui konsep sejarah. Sejarah merupakan suatu kajian tentang aktivitas manusia pada masa lampau, baik di bidang politik, militer, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan hasil kreativitas seni. Definisi ini cenderung menempatkan sejarah sebagai kajian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti lepas dari elemen-elemen yang menjadi prasyarat terbentuknya suatu peristiwa sejarah. Aspek yang terkait dengan peristiwa sejarah, aspek peristiwa itu sendiri, aspek ruang, aspek waktu, perubahan dan kesinambungan (Arif, 2011:7).

Dalam kajian sejarah, manusia sebagai objek utama dalam menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupannya akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi seperti adanya sebuah aturan, wewenang dan sekelompok orang yang memiliki wewenang dan memerintah. Dalam kehidupan di sini bukan hanya seputar tentang aturan untuk saling menghormati ataupun aturan yang sudah mutlak seperti ketentuan yang telah ada akan tetapi tentang sebuah kekuasaan yang di dalamnya akan ada sekelompok orang yang menjadi pemerintah dan menciptakan aturan. Sejarah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi pada kehidupan manusia, yang pada dasarnya peristiwa itu telah ada yang menentukan. Baik dalam takdir yang terjadi dan suatu saat peristiwa tersebut berputar yang kemudian akan terjadi lagi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori perkembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka. Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.

Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu. Menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah “the

process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions. Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama. Maka dari itu, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai September 2019. Tempat penelitian adalah di daerah Taobonto Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini juga telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Halu Oleo, kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bombana, Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan Laboratorium Ilmu Sejarah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah, dengan menggunakan pendekatan strukturalis. Leirissa (1996:12) menyatakan bahwa terdapat tiga domain dalam penelitian sejarah yaitu domain peristiwa, domain struktur, dan domain strukturalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalis yang mempelajari dua domain yakni domain peristiwa dan domain struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur, sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat, dimana kondisi dalam peristiwa tersebut melibatkan dua kelompok masyarakat yakni masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Pada peristiwanya masyarakat kelas atas yakni pimpinan Kerajaan Moronene serta para bangsawanya pada awalnya merupakan sekutu dari Belanda dengan beberapa kesepakatan dagang, namun beberapa perjanjian dagang banyak dilanggar dan kurang menguntungkan pihak kerajaan. Atas dasar itulah muncul gejolak di kalangan masyarakat kelas bawah dengan lahirnya kelompok-kelompok perlawanan atas Belanda. Kerajaan kemudian melakukan perlawanan sebab mendapat dukungan masyarakat sehingga terdapat kesamaan pemahaman atas penindasan imperialisme Belanda.

Penelitian ini mengkaji tiga kategori sumber yakni tertulis, lisan dan visual (benda). Sumber tertulis terdiri atas dua yaitu dokumen dan sumber kepustakaan. Dokumen yaitu sumber yang diperoleh dalam bentuk arsip berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dari dokumen yang diteliti didapatkan beberapa gambar dan potongan-potongan narasi yang memiliki hubungan dengan perlawanan masyarakat atas imperialisme Belanda. Adapun sumber kepustakaan dalam bentuk buku, skripsi, hasil penelitian yang diperoleh di perpustakaan Universitas Halu Oleo, Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara.

Sumber lisan yang digunakan yaitu sumber yang diperoleh dari informan yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh sejarah yang mengetahui informasi dan dapat memberikan gambaran tentang Imperialisme Belanda di Toubonto pada masa silam. Dari penjelasan beberapa informan didapatkan beberapa poin penting dalam penelitian ini terkhusus mengenai dampak dan strategi perlawanan Kerajaan Moronene serta alur cerita sehingga dilakukannya perlawanan yang telah dituangkan pada bab hasil penelitian ini.

Adapun sumber visual yang digunakan yaitu sumber yang diperoleh melalui hasil pengamatan secara langsung terhadap berbagai benda-benda peninggalan sejarah. Sumber visual yang berkaitan dengan penelitian ini seperti sarana fisik yang ada pada lokasi penelitian seperti bangunan-bangunan tempat tinggal raja-raja Kerajaan Moronene, senjata berupa meriam, dan lokasi perlawanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2013: 69-82) bahwa metode penelitian sejarah terdiri dari lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik sumber, verifikasi sumber, interpretasi sumber dan historiografi. Berdasarkan pendapat

yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo maka penelitian ini melalui prosedur atau tahap-tahap kerja sebagai berikut:

a. Pemilihan Topik

Dalam pemilihan topik penulis memilih topik yang berkaitan dengan sejarah sebab penelitian ini adalah penelitian sejarah. Adapun topik yang dipilih berdasarkan pertimbangan dua hal yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional yaitu penulis harus mampu membuktikan bahwa topik yang dipilih benar-benar topik sejarah. Kedekatan intelektual, yaitu peneliti mampu menempatkan persoalan-persoalan yang pokok yang diteliti sesuai dengan kenyataan di lapangan.

b. Heuristik Sumber

Teknik pengumpulan sumber yang digunakan peneliti yaitu mengacu pada prosedur peneliti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo maka pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini yaitu dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik tertulis, dan tidak tertulis (lisan), artikel, maupun internet. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut: Pertama, studi dokumen, yakni metode pengumpulan data dengan cara mengkaji data atau sumber-sumber yang relevan dengan judul penelitian ini, yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan. Kedua, studi kepustakaan, berkaitan dengan telaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ketiga, studi lisan yaitu wawancara (*interview*) ini dapat diperoleh dari wawancara langsung dengan para informan yaitu masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat yang mengetahui tentang Perlawanan Rakyat Moronene terhadap Imperialisme di Daerah Taubonto: 1911-1941. Keempat, sumber visual (kebendaan) kondisi sosial yang ada di daerah Taubonto tepatnya di Kabupaten Bombana berupa bekas ibukota kerajaan Moronene di Taubonto dan meriam yang digunakan pada saat perang.

c. Verifikasi Sumber

Verifikasi sumber adalah suatu teknik analisis untuk menilai otentisitas (keaslian) dan kredibilitas (kebenaran) suatu sumber data yang telah dikumpulkan baik luar maupun isinya. Untuk itu peneliti menempuh cara yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik ekstern, yaitu kritik yang dilakukan untuk memulai autensitas (keaslian) sumber data yang didapatkan, dalam hal ini dilakukan analisis terhadap bentuk luar dari sumber data tersebut, Nugroho Notosusanto (1978: 38) mengajukan 3 pertanyaan pokok di dalam melakukan kritik eksternal terhadap suatu sumber yaitu : (1) Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki; (2) Apakah sumber itu asli atau turunan; dan (3) Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Maka dari itu penulis menggunakan sumber yang dikehendaki, asli dan sumber yang utuh. Kritik intern, yaitu kritik yang dilakukan untuk menilai kredibilitas (kebenaran) isi sumber data yang didapatkan dengan cara membandingkan isi sumber tersebut dengan bukti-bukti lainnya melalui hasil observasi, studi lisan, dan studi dokumen di lokasi penelitian.

d. Interpretasi Sumber

Setelah melakukan penelitian data melalui kritik ekstern dan intern, maka selanjutnya data tersebut kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan dengan mengacu pada konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian interpretasi dan otentitas dan kredibilitas sumber data yang sudah ditetapkan melalui kritik selanjutnya dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya sehingga didapatkan fakta sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya secara ilmiah.

e. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian penelitian sejarah. Pada bagian ini penulis menyusun kisah secara kronologis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta dan konsep-konsep serta teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Perlawanan Rakyat Moronene terhadap Imperialisme Belanda di Daerah Taubonto pada Tahun 1911-1941

Pembahasan mengenai perlawanan Rakyat Moronene terhadap imperialisme Belanda di Taubonto tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat di berbagai wilayah sekitar. Rakyat Moronene melakukan perlawanan karena Belanda telah mengubah sistem pemerintahan kerajaan Moronene. Masyarakat Moronene juga menganggap Belanda telah memperlakukan masyarakat dengan semena-mena. Dalam struktur pemerintahan Buton, Bombana atau Moronene merupakan wilayah inti yang terbagi atas tiga wilayah yaitu Poleang, Kabaena dan Rumbia. Menurut hukum adat milik para Sapati, wilayah Moronene merupakan penopang ekonomi bagi kerajaan Buton yang telah dikuasai oleh imperialisme Belanda.

Sebab-sebab dilakukannya perlawanan rakyat dan Kerajaan Moronene saat itu dilandasi oleh beberapa faktor penting sehingga gejolak tersebut terjadi. Hal tersebut bermula ketika Kerajaan Moronene melakukan kesepakatan dagang dengan pihak Belanda. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut mengalami beberapa kali revisi. Selama proses revisi kesepakatan terlihat pihak kerajaan cenderung dirugikan oleh pihak Belanda sehingga pihak kerajaan mulai tidak nyaman dengan kesepakatan tersebut. Berselang beberapa lama ketika Belanda mulai merasa dapat mengendalikan pihak kerajaan dan masyarakatnya, terjadilah beberapa terobosan Belanda yang mengusik kenyamanan masyarakat dan pihak kerajaan saat itu.

Kemarahan masyarakat Moronene memuncak ketika Belanda mengeluarkan kebijakan membagi Kerajaan Moronene menjadi tiga kerajaan kecil. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak Belanda mengawasi serta melakukan penarikan pajak tinggi dari masyarakat. Masyarakat kemudian mulai melakukan perlawanan pada tahun 1911 hingga puncaknya tahun 1941.

Sebagaimana dijelaskan informan penelitian yang mengungkapkan alasan dari perlawanan bahwa:

“Latar belakang perlawanan Rakyat Moronene terhadap imperialisme Belanda di Taubonto karena pemerintahan Belanda di Buton mengeluarkan sejumlah kebijakan, misalnya pembentukan distrik-distrik baru di wilayah kekuasaan kesultanan dan menerapkan sistem pajak yang tinggi yang merugikan masyarakat Moronene. Kebijakan ini menimbulkan keresahan pada masyarakat Moronene sehingga menjadi awal pertikaian”. (H. Nasrin, wawancara, 30 Juli 2019).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa kebijakan pembentukan distrik-distrik tentunya berlawanan dengan kebiasaan dan mencederai pemerintahan Kerajaan Moronene. Hal tersebut tentunya mengusik masyarakat Moronene yang sekian lama nyaman dan bangga dengan kerajaannya sendiri. Hal ini justru membuktikan bahwa Belanda tidak menghargai Kerajaan Moronene sebagai sebuah kerajaan besar pada saat itu.

Secara khusus perlawanan yang dilakukan rakyat Moronene yang dipimpin oleh Sangia Dowo dan kawan-kawan disebabkan oleh beberapa hal. Di bidang politik misalnya, pemerintahan Hindia Belanda senantiasa melakukan perluasan pengaruhnya dengan jalan ikut campur tangan yakni mengangkat pejabat-pejabat dalam kerajaan Moronene. Tindakan campur tangan tersebut

menimbulkan kemarahan rakyat Moronene terhadap Belanda yang berwujud dalam suatu perlawanan secara menyeluruh terhadap Belanda (Chalik 2005: 22).

Dijelaskan pula oleh salah satu informan bahwa :

“Kebencian rakyat Moronene terhadap Belanda semakin meningkat ketika Belanda berhasil memperdaya para bangsawan-bangsawan Moronene. Belanda kemudian mengundang Sangia Dowo untuk bertemu dan berhasil meracuninya. Selain itu Belanda juga melakukan monopoli perdagangan di wilayah Moronene maka hal ini membangkitkan semangat rakyat untuk menentang pemerintahan Belanda (Ismail, Wawancara, 1 Agustus 2019).

Informan lainnya menegaskan bahwa perlawanan rakyat Moronene terhadap imperialisme Belanda menjadi semakin intens ketika Raja Moronene yaitu Sangia Dowo diracun oleh pihak Belanda saat dilakukan perundingan gencatan senjata. Selain itu, struktur pemerintahan yang disusun oleh Belanda tidak sesuai dengan adat kerajaan Buton di mana kepala distrik diberikan status adat dalam kerajaan sehingga kepala distrik bentukan Belanda ini identik dengan jabatan adat (H. Narsin, Wawancara 5 Agustus 2019).

Dengan demikian perlawanan rakyat Moronene menentang Belanda dilatarbelakangi oleh tindakan pemerintahan Belanda yang memperkenalkan sistem pemerintahan baru sehingga masyarakat melakukan perlawanan. Hal ini membawa perubahan dalam pemerintahan berkaitan dengan konsep kekuasaan tradisional, berkaitan dengan kewibawaan kepemimpinan, serta keyakinan yang tersebar atau ideologi pribumi. Masyarakat memiliki pendirian bahwa orang Belanda lah yang harus menyesuaikan keadaan sosial yang ada di kerajaan Moronene. Ideologi inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat pribumi dalam pendirian kekuasaan tradisional (S.Limba, 2015 : 122).

Sebelum terjadinya perlawanan fisik, terlebih dahulu sudah dilakukan perundingan antara pemerintah Belanda dengan Raja Moronene Sangia Dowo, namun perundingan yang dilakukan tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Karena perundingan gagal maka dilakukanlah perlawanan secara fisik (dengan kekerasan). Karena pada bulan Maret 1911 Sangia Dowo sebagai raja dan juga sebagai panglima perang memerintahkan pemimpin-pemimpin pasukannya untuk melakukan perlawanan. Sehingga terjadi peperangan yang sengit antara pasukan Poleang dan pasukan Belanda. Pasukan Poleang menembaki pasukan Belanda dengan meriam dan senapan yang mereka peroleh dari Portugis. Pasukan Belanda yang tidak mengenal medan perang kemudian mundur atas perintah De Jonges pasukan Belanda mengudurkan diri dan membuat kema atau kubu pertahanan di pinggir sungai La Ea. Namun masyarakat Moronene menghujanin mereka dengan peluru.

3.2 Strategi perlawanan Rakyat Moronene terhadap Imperialisme Belanda di Taubonto 1911-1941

Raja Moronene Sangia Dowo menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Meskipun disadari bahwa kekuatan yang dimiliki tidak akan mampu menghadapi tentara Belanda, namun jiwa nasionalis Sangia Dowo tidak gentar menghadapi lawan. Adapun strategi yang digunakan rakyat Moronene dalam melakukan perlawanan terhadap Imperialisme Belanda adalah sebagai berikut:

a. Menekan Psikologi Pasukan Belanda

Sebagaimana diketahui bahwa pihak Belanda telah mengetahui bahwa rakyat Moronene akan melakukan perlawanan atas kehadirannya di tanah Moronene. Belanda kemudian mengerahkan pasukan beserta persenjataan lengkapnya untuk membumihanguskan pasukan-pasukan kerajaan yang berada di Toburi. Pasukan kerajaan paham Belanda mengerahkan pasukanya

serta persenjataan lengkapnya untuk menyerang basis-basis pasukan kerajaan, maka Raja *Sangia Dowo* mengambil beberapa strategi salah satunya menekan psikologis pasukan Belanda.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh informan bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh *Sangia Dowo* saat menghadapi Belanda saat itu adalah memerintahkan pasukan untuk membunyikan meriam dan senjata. *Sangia Dowo* juga meminta masyarakat untuk melakukan sorak sorai membelah angkasa sehingga menimbulkan ketakutan pasukan Belanda dan pada akhirnya mereka mundur sebelum tiba di Kerajaan Moronene” (Abdul Hamid, Wawancara, 2 Agustus 2019).

Sangia Dowo sebagai raja dan panglima perang segera memerintahkan pemimpin-pemimpin pasukan untuk mengadakan perlawanan. Pasukan kerajaan menembaki pasukan-pasukan Belanda dengan meriam dan senapan yang diperoleh dari Portugis. Di samping itu sorak sorai pasukan kerajaan membelah angkasa menimbulkan kepanikan pada pasukan Belanda sebab pasukan Belanda tidak mengetahui medan, maka atas perintah Kapten De Jongens pasukan Belanda mengundurkan diri dan membuat kema di pinggir kali La Ea. Di sanapun mereka selalu dihujani dengan peluru, sehingga Kapten De Jongens terpaksa mengubah taktik perangnya.

Sangia Dowo selaku pimpinan pasukan Kerajaan Moronene menganggap bahwa tentara Belanda sudah mundur dan meninggalkan kubu pertahanannya karena balasan tembakan sudah tidak ada. Akan tetapi dalam suasana yang sedemikian itu De Jongens melanjutkan terus siasatnya dengan mengutus seorang juru bahasa datang menghadap raja untuk meminta berdamai dan berunding. Untuk perundingan tersebut pihak Belanda meminta agar diselenggarakan di luar kota yaitu di Labuan. Permintaan De Jongens diterima dengan baik oleh pihak kerajaan karena tempat yang ditawarkan itu masih wilayah Kerajaan Moronene. *Sangia Dowo* dengan dikawal oleh 17 orang Tamalaki (ksatria) pilihan, berangkat menuju Labuan untuk berunding, demikian pula De Jongens dengan dikawal oleh beberapa anak buahnya menuju ke tempat perundingan sementara pasukan Belanda lainnya berangkat ke Boepinang menunggu selesainya perundingan.

b. Strategi Diplomasi

Salah satu cara yang dilakukan pihak kerajaan untuk melakukan perlawanan terhadap imperialisme Belanda yakni melalui jalur diplomasi. Sayangnya pemimpin perlawanan rakyat Moronene Raja *Sangia Dowo* harus meninggal setelah diracun oleh pihak Belanda saat perundingan. Ketika perundingan sudah berlangsung selama beberapa hari, dalam suatu perjamuan makan bersama, De Jongens memerintahkan seorang pengawal untuk membubuhi racun pada makanan *Sangia Dowo*. Tanpa curiga sedikitpun *Sangia Dowo* memakan hidangan yang telah disiapkan baginya. Seketika itu pula Raja Moronene tersebut kehilangan keseimbangan. Ia menyadari bahwa ia telah diracun oleh Belanda, sebelum raja menghembuskan napas terakhirnya ia masih sempat mengucapkan sesuatu pernyataan sifat patriotiknya “Mati adalah soal biasa tetapi munafik itu hukumnya dosa, mati adalah pilihan seorang pahlawan yang mencintai tanah airnya, meskipun aku telah mati karena tipu muslihatmu namun jiwaku tetap hidup dan melawan bangsamu”.

“Selama 18 hari Kerajaan Moronene melakukan strategi diplomasi dengan pihak Belanda, dan Kapten De Jongens menunjukkan keramahan serta kejujurannya, dan sebagai raja yang ksatria *Sangia Dowo* mempercayai perilaku De Jongens yang ternyata munafik,” (Alfian Mpimpie, Wawancara, 10 Agustus 2019).

3.3 Dampak Perlawanan Rakyat Moronene terhadap Imperialisme Belanda di Taubonto 1911-1941

Perjuangan rakyat Moronene menentang imperialisme Belanda di daerah Taubonto pada 1911-1941 merupakan peristiwa tingkat lokal namun memiliki dampak yang besar. Perlawanan masyarakat Moronene telah membuktikan kesetiaan terhadap wilayahnya agar Belanda keluar dari kerajaan Moronene. Berikut dampak perlawanan rakyat Moronene terhadap Imperialisme Belanda.

a. Bidang Politik

Akibat perlawanan rakyat Moronene di Toburi beberapa pemimpin rakyat ditangkap kemudian dibuang dan dipenjara. Setelah Belanda berhasil menguasai Kerajaan Moronene, Belanda mendirikan pemerintahan Hindia Belanda. Raja-Raja yang diangkat adalah atas keputusan pemerintahan Belanda, kedudukan raja atas wilayah kekuasaan hanya merupakan boneka yang setiap gerak langkahnya diatur oleh Belanda. Sejak itu kehidupan rakyat menjadi melarat karena mereka bekerja keras untuk kepentingan Belanda. Adapun raja yang diangkat Belanda hanya harus melakukan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan Belanda (Sumber: Jalil, Wawancara 5 Agustus 2019).

b. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, rakyat Moronene mengalami penderitaan. Monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan masyarakat di panggung perdagangan. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda. Kebijakan tanam paksa serta sistem ekonomi liberal menjadikan perekonomian Moronene dieksploitasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa : “dampak perlawanan tersebut di bidang ekonomi yakni masyarakat semakin tercekik oleh kebijakan pajak Belanda yang sangat menyiksa perekonomian masyarakat Moronene. Tingginya pajak yang dipungut oleh Belanda menjadi hari-hari gelap dalam kehidupan masyarakat moronene”. (H. Narsin, Wawancara, 12 September 2019).

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang perlawanan rakyat Moronene didasari oleh semangat perjuangan atas keinginan untuk berdikari tanpa campur tangan pihak Belanda. Semangat masyarakat Moronene dikobarkan oleh Sangia Dowo seorang Raja Moronene yang melakukan perlawanan.
2. Rakyat Moronene bergerilya dalam melawan Belanda. Mereka juga melakukan serangan terang-terangan melalui pembelian senjata perang dari Portugis. Adapun strategi lain yang digunakan saat melawan Belanda yakni berusaha menekan psikologi tantara Belanda serta berdiplomasi.
3. Perlawanan rakyat Moronene menyebabkan gugurnya banyak Raja Moronene salah satunya yaitu Raja Sangia Dowo. Sangia Dowo meninggal diracun oleh Belanda melalui perjamuan makan malam dalam rangka pertemuan saat melakukan gencatan senjata. Kekalahan Kerajaan Moronene menyebabkan jatuhnya wilayah tersebut ke Pemerintahan Belanda. Kekalahan tersebut menyebabkan rakyat Moronene menderita akibat pemungutan pajak yang tinggi dan kebijakan kerja rodi oleh Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Ruslan. 1967. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Prapanja.
- Arif, Muhamad. 2001. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.
- Gusman. 2005. *Perlawanan Rakyat Tongauna dalam Menentang Penjajahan Belanda di Kerajaan Konawe (1908-1909)*. Kendari: Skripsi FKIP Unhalu.
- Hadara, Ali. 2019. "*Prosedur dan Pendekatan dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*". Kendari: Sekar Langit.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi 1*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 1997. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Limba, Rekson S. 2015. *Sejarah Peradaban Moronene*. Kendari: Penerbit Lukita
- Leirissa, R.Z. 1996. *Historiografi: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Legawa, N. 2007. *Nasionalisme PostKolonial* (Studi tentang Pengaruh Kolonialisme terhadap Tumbuhnya Identitas Nasional Indonesia Postkolonial). Jurnal
- Mas'oed, A.M, 2000, "*Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini*" *Regionalisme, Nasionalisme, dan Keutuhan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada Perss.
- Nasution. 1998. *Komunikasi Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho Notosusanto. 1978. *Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta :YayasanIdayu:.
- . 2007, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKIS.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tomlinson, John. 2001. *Cultural Imperialisme: a Critical Introduction*. London: Continuum International
- Toynbee, Arnold.J. 1961. *Reconsiderations*. London : University Pers.
- Utomo, Budi Cahyo. 2006. *Imperialisme Belanda pada Masa Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta tahun 1948-1949*. Bandar Lampung: Skripsi FKIP Universitas Lampung.
- Zubir, Raiyardam, 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran*. Yogyakarta: Insist Perss.